



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat di selesaikan tepat waktu sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini di maksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap konsisten dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bombana. Dalam penyusunan Renja Dinas kesehatan Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Isu strategis Nasional sehingga tetap dapat sinergis antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan Negara Indonesia khususnya Bidang Kesehatan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sehingga menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga Dokumen Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024, serta sebagai dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi.

Rumbia, Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA,



DARWIN SE
NIP. 19730819 200604 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas kesehatan Kabupaten Bombana	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas kesehatan	50
3.3. Program dan Kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas kesehatan Tahun 2024	69
BAB V PENUTUP	
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	84
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	85
5.3. Rencana Tindak Lanjut	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahawa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja OPD menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Renja yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Diatur bahwa tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari empat tahap yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan kegiatan. Dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat di ketahui bahwa kualitas dari Dokumen Renja di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam Menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sehingga di harapkan dengan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 di harapkan mampu meningkatkan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan kabupaten Bombana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024. Penyusunan Renja juga dapat sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2025) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesehatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, yang pada akhirnya menghasilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. maka sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Tujuan dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 adalah untuk menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024. Dari Analisa hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 kita dapat mengidentifikasi kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, dapat mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja Renstra OPD dan dapat mengetahui permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Keberhasilan suatu proses pelayanan kesehatan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan di tahun-tahun mendatang. Pengukuran kinerja pada sasaran telah dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil bahwa sebagian besar sasaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 mengacu pada laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah tahun 2022. Secara rinci rekapitulasi Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2022 di uraikan pada table 2.1.

A. Evaluasi terhadap pencapaian target

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan Rencana Kerja yang terdiri dari 5(lima) Program dan 13(tiga belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis di bidang kesehatan. Secara rinci evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana TA. 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana indikator Kinerja Program yaitu Cakupan Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan dan Layanan Administrasi Perkantoran secara umum pencapaian indicator kinerja dan target kinerja dapat mencapai 97,81%. Sasaran dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabuapten Bombana yang di capai dengan Predikat Nilai SAKIP B.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dimana indikator Kinerja Program yaitu Persentase Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang sesuai standar, secara umum pencapaian indicator kinerja dan target kinerja dapat mencapai 93,61%. Sasaran dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Meningkatnya angka Harapan Hidup. Pada Tahun 2022 Capaian Kabupten Bombana untuk Usia Harapan Hidup (AHH) rata-rata 69.20 Tahun.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terdiri dari kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, secara umum pencapaian indicator kinerja dan target kinerja dapat mencapai 99,88%.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, yang terdiri dari kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) secara umum pencapaian indicator kinerja dan target kinerja dapat mencapai 88,34%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang terdiri dari kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota secara umum pencapaian indicator kinerja dan target kinerja dapat mencapai 59,28%.

B. Evaluasi terhadap kinerja keuangan

Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana telah menyusun Laporan Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana pada tahun 2022 anggaran belanja yang di kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebesar Rp. 97.382.491.450,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 73.885.888.250,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) dan Belanja Modal sebesar Rp. 23.496.603.200,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*). Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 97.382.491.450,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu*

Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana telah merealisasikan anggaran yang dimaksud secara efisien dan efektif sebesar Rp. 92.323.833.258,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) atau 94,81% dan sisa dana sebesar Rp. 5.058.658.192,00 (*Lima Milyar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) atau 5,19% merupakan SILPA di Kas Daerah.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2022 di jabarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	97.382.491.450	92.323.833.258	94,81
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	38.539.295.400	37.537.799.168	97,40
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.002.100	51.542.400	83,13
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.492.344.000	31.669.614.035	97,47
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.900.000	39.723.750	99,56
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.651.849.300	1.608.379.597	97,37

	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.180.700.000	4.082.185.898	97,64
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.500.000	86.353.488	76,76
2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.603.278.450	53.919.912.340	93,61
	7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.647.025.150	25.215.450.676	94,63
	8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.637.376.740	28.410.030.764	92,73
	9	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	75.081.200	61.685.000	82,16
	10	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.795.360	232.745.900	95,47
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	64.605.000	64.530.000	99,88
	11	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	64.605.000	64.530.000	99,99
4		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	360.916.400	318.825.400	88,34
	12	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	360.916.400	318.825.400	88,34
5		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	814.396.200	482.766.250	59,28
	13	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	814.396.200	482.766.250	59,28

Tabel. 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

Periode Pelaksanaan : 2022

Kode							Urusan/OPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja		OPD Penanggungjawab
										Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1							2	3	4	5	6	7	8	9= $(7/5*100)$	10= $(8/6*100)$	11
02							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
02	01						Dinas Kesehatan									
02	01	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
02	01	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
02	01	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	0	-	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	Dokumen	1 Dokumen	28.827.500	1 Dokumen	18.658.000	100	64,72	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	33.174.600	1 Dokumen	32.883.500	100	99,12	Dinas Kesehatan

							Realisasi Kinerja SKPD									
02	01	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
02	01	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Tahun	1 Tahun	32.362.144.000	1 Tahun	31.539.414.035	100	97,46	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tahun	1 Tahun	130.200.000	1 Tahun	130.200.000	100	100,00	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
02	01	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya yang dibeli	Paket	1 Paket	39.900.000	1 Paket	39.723.750	100	99,56	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
02	01	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah logistik kantor yang dibeli	Tahun	1 Tahun	46.458.500	1 Tahun	46.457.273	100	100,00	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Tahun	1 Tahun	35.149.800	1 Tahun	35.149.700	100	100,00	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah buku yang dibeli	Tahun	1 Tahun	86.400.000	1 Tahun	79.650.000	100	92,19	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tahun	1 Tahun	19.200.000	1 Tahun	13.389.700	100	69,74	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Tahun	1 Tahun	1.464.641.000	1 Tahun	1.433.732.924	100	97,89	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

02	01	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air	Tahun	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	149.985.898	100	99,99	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Tahun	1 Tahun (370 Org)	4.030.700.000	1 Tahun (370 Org)	3.932.200.000	100	97,56	Dinas Kesehatan
02	01	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									
02	01	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dilunasi pajaknya	Tahun	1 tahun (24 Unit)	112.500.000	1 tahun (24 Unit)	86.353.488	100	76,76	Dinas Kesehatan
02	01	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
02	01	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten yang disediakan			26.647.025.150		25.215.450.676			
02	01	02	02	2	01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah dan luas puskesmas yang dibangun	Puskesmas	3 Puskesmas	-	3 Puskesmas	-	-	#DIV/0!	
02	01	02	02	2	01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah dan luas fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Paket	10 Paket	4.096.413.580	10 Paket	1.055.137.950	40	25,76	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah dan luas rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Puskesmas	3 Puskesmas	-	3 Puskesmas	-	-	#DIV/0!	
02	01	02	02	2	01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah dan luas puskesmas yang dikembangkan	Puskesmas	2 Puskesmas	901.000.000	2 Puskesmas	191.670.000	-	21,27	Dinas Kesehatan

02	01	02	02	2	01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah dan luas puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	Puskesmas	5 Puskesmas	424.000.000	5 Puskesmas	-	-	-	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan luas faskes lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara	Paket	10 paket	6.916.433.620	10 paket	716.592.400	-	10,36	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis dan jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibeli	Paket	10 paket	4.017.558.100	10 paket	134.475.000	-	3,35	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis dan jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dibeli	Paket	10 paket	5.783.037.800	10 paket	357.339.500	-	6,18	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat,Vaksin	Jenis dan jumlah obat dan vaksin yang dibeli	Paket	1 paket	4.434.762.100	1 paket	2.376.876.339	10	53,60	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis dan jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	Puskesmas	22 Puskesmas	73.819.950	22 Puskesmas	20.710.000	20	28,05	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata cakupan penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar								
02	01	02	02	2	02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persentase	100%	-	100%	-	100	#VALUE!	
02	01	02	02	2	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persentase	100%	268.889.800	100%	268.779.800	100	99,96	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	100%	418.585.150	100%	267.281.250	100	63,85	Dinas Kesehatan

02	01	02	02	2	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	100%	71.076.400	100%	64.680.400	100	91,00	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase masyarakat terdampak Covid-19 yang mnedapatkan pelayanan kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100%	523.008.000	100%	498.584.000	100	95,33	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase masyarakat dengan masalah gizi (stunting, kurus, berat badan lahir rendah, obesitas, anemia, dll) yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi sesuai standar	Persentase	100%	893.653.000	100%	490.967.000	70	54,94	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah laporan pelayanan kesehatan lingkungan yang disusun	Persentase	100%	406.706.400	100%	392.974.534	100	96,62	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah masyarakat yang memperoleh penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persentase	100%	191.821.900	100%	176.505.400	100	92,02	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah laporan penyelenggaraan surveilans kesehatan sesuai standar yang disusun	Persentase	100%	149.968.000	100%	147.158.366	100	98,13	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	100%	-	100%	-	100	-	
02	01	02	02	2	02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan epidemiologi dan Persentase penduduk yang mendapatkan skrining faktor risiko PTM	Persentase	100%	1.349.403.250	100%	1.205.641.725	90	89,35	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta penerima iuran jaminan kesehatan masyarakat	Persentase	100%	23.616.694.640	100%	23.116.929.796	100	97,88	Dinas Kesehatan

02	01	02	02	2	02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Persentase	100%	1.163.121.000	100%	1.027.444.117	80	88,34	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dan penilaian ReAkreditasi	Persentase	100%	1.584.448.400	100%	753.084.376	50	47,53	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melakukan sistem penanganan gawat darurat terpadu	Persentase	100%	-	100%	-	100	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi									
02	01	02	02	2	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah unit kerja/fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Persentase	100%	75.081.200	100%	61.685.000	100	82,16	Dinas Kesehatan
02	01	02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
02	01	02	02	2	04		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Persentase	100%	243.795.360	100%	232.745.900	100	95,47	Dinas Kesehatan
02	01	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									

							dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/Kota									
02	01	02	05	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait yang diberikan advokasi terkait promosi kesehatan	Persentase	100%	814.396.200	100%	482.766.350	60	59,28	Dinas Kesehatan

Ada beberapa hal yang menyebabkan Program dan Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah TA. 2022 tidak terealisasi 100% antara lain:

- a. Kuantitas dan Kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang dan distribusi SDM Kesehatan yang tidak merata.
- b. Sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan kesehatan masyarakat belum memadai dan tidak merata, dimana dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kurangnya capaian target kinerja Program/Kegiatan antara lain dengan meningkatkan kemampuan manajemen pelayanan kesehatan dengan penguatan SDM Kesehatan dan institusi penunjang kesehatan dengan melakukan kajian, penelitian, pelatihan dan pengembangan program-program kesehatan strategis, meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan dukungan sarana, prasarana, SDM dan teknologi kesehatan yang dapat menjawab kompleksitas permasalahan kesehatan, dengan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana adalah Perangkat Daerah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten di Bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Bombana, dimana dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bombana serta memperhatikan Tugas Pokok dan fungsinya yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang di jabarkan ke dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Pelaksanaan Good Governance berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan publik kepada stakeholdernya. Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan

jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat. Dinas kesehatan Kabupaten Bombana secara hirarki memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan dimana kesehatan adalah Hak Azazi Manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Bombana Khususnya. Untuk itu perlu penyelenggaraan pembangunan Kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi antara pemerintah dan masyarakat maupun swasta.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, dijelaskan Bahwa Dinkes Kabupaten Bombana adalah Perangkat daerah Unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten di Bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dilaksanakan berdasarkan Perbu Nomor 40 Tahun 2016 tersebut.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mempunyai Tugas pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan

B. Fungsi :

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

C. Kewenangan :

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan mempunyai kewenangannya sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian kesehatan di daerah;
2. Melaksanakan bimbingan konsultasi dan koordinasi bidang kesehatan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di puskesmas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Indikator Kinerja tahun 2022. Pengukuran kinerja tersebut mencakup :

- a. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
- b. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 Dinas Kesehatan kabupaten Bombana, tingkat realisasi capaian target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang dicapai dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 2.3

Realisasi Target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	% Tahun 2022
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	0	0,002491 (249,14 Indeks)	99,75
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	0	0,011211 (11,21 Indeks)	98,89
3.	Angka Kematian Balita (AkBa)	/1.000 KH	0	0,011523 (11,52 Indeks)	98,86
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100
5.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	73	72,29	99,03

Dari table di atas dapat dilihat bahwa masih ada 4 indikator kinerja yang belum memenuhi target yakni Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Sedangkan indikator cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sudah mencapai target.

Khusus Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dianggap perlu adanya peninjauan ulang target yang bisa direvisi nanti pada saat penyusunan Renstra Perubahan, hal ini karena pada kenyataannya target sangat jauh di bawah pencapaian rata-rata.

Dibandingkan target nasional, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita sudah mencapai target dimana target nasional Angka Kematian Ibu 306, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita 24.

Dibandingkan target nasional, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita sudah mencapai target dimana target nasional Angka Kematian Ibu 306, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita 24.

Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

Dalam pelaporan SPM tahun 2022 masih terdapat capaian pada masing-masing urusan pengampu SPM yang belum mencapai 100 persen, disebabkan berbagai macam permasalahan, diantaranya penentuan sasaran yang terlalu tinggi yang tidak sesuai data riil di lapangan daerah masing-masing karena penentuan sasaran berdasarkan Pusdatin, Program dan Kegiatan yang belum masuk kedalam dokumen perencanaan, kemudian pemahaman tim penyusun dalam melaporkan capaian indikator SPM dan lain sebagainya.

Diharapkan kedepannya standar pelayanan minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Tabel 2.4

Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Sasaran	Absolut	Capaian(%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	4.085	2.797	68,47
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.900	3.059	78,44
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.714	2.904	78,19
4	Pelayanan kesehatan balita	14.509	9.355	64,48
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	5.819	4.756	81,73
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	120.218	28.222	23,48
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	16.192	9.044	55,85
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	46.106	12.608	27,35
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	2.082	2.082	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	245	86	35,10
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	3.173	3.173	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	3.323	2.508	75,47

Pada Bab ini juga menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam kurun waktu Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam upaya meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat memiliki target kinerja dalam penyelenggaraan urusan bidang kesehatan yang disajikan dalam tabel dibawah

No.	Indikator Kinerja Kunci	Sat	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	66,67	73,33	80,00	86,67	100,00	100,00	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	84,17	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94,15	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,54	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95,01	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	27,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.	Persentase warga usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	85,72	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11.	Persentase	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

	penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar							
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	75,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perwujudan kewajiban, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tidak lepas dari adanya tantangan yang dapat menghambat kelancaran tupoksinya. Berdasarkan analisis dan telaah terhadap rencana strategis Dinas Kesehatan, tantangan yang ada diantaranya masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan dan sebarannya yang tidak merata, penyediaan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan, masih kurangnya pemanfaatan Sistem Informasi kesehatan dalam penyediaan data dan informasi kesehatan serta masih adanya daerah yang berada pada kondisi daerah terpencil. Sehingga hal ini merupakan tuntutan tersendiri bagi aparaturnya pemerintah khususnya pada organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. Beberapa kondisi yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja secara maksimal antara lain:

1. Sebaran yang tidak merata dan masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Belum maksimalnya penggunaan sistem informasi kesehatan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung program kesehatan belum terkelola dengan baik;
3. Kurangnya evaluasi pelaksanaan kegiatan menyebabkan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat puskesmas kurang efektif;

Dalam perkembangan Dinas Kesehatan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada, Dinas Kesehatan diharapkan responsif, kreatif dan

inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas dan bermutu dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan sumber daya Kesehatan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dan tinjauan lapangan/masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana antara lain: Perubahan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Beberapa peluang yang dapat dijadikan faktor pendukung bagi kinerja Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana antara lain:

- a. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Bombana;
- b. Bantuan dana kesehatan dari pemerintah pusat yang berupa dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan);
- c. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang ada dapat menunjang dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sangat tergantung oleh kondisi perkembangan dan perubahan, baik kebijakan pembangunan daerah maupun perubahan-perubahan dalam perencanaan daerah yang disesuaikan dengan program-program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024.

Tabel. 2.6
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

Sasaran OPD/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Lokasi
		Satuan	Target	Rp			Satuan	Target	Rp	
(4)	(5)		(10)	(11)	(4)	(5)		(10)	(11)	(19)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Umur Harapan Hidup (UHH)		71.18	30.900.000.000	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Umur Harapan Hidup (UHH)		71.18	44.887.000.000	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Indeks	0.0	13.340.000.000		Angka Kematian Ibu (AKI)	Indeks	0.0	17.032.000.000	Kab. Bombana
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Indeks	0.0			Angka Kematian Bayi (AKB)	Indeks	0.0		
	Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Persen	100			Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Persen	100		
	Prevalensi Balita Stunting	Indeks	19,00			Prevalensi Balita Stunting	Indeks	19,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%)	Persen	100	11.810.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%)	Persen	100	15.502.000.000	Kab. Bombana
	Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	Persen	100			Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	Persen	100		
	Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Persen	100			Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Persen	100		
	Persentase Pelayanan Balita Stunting (%)	Persen	100			Persentase Pelayanan Balita Stunting (%)	Persen	100		

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		100%	11.700.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		100%	15.392.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	1.300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.205	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	1.300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.014	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	1.300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3.823	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7635	500.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5819	400.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	120.218	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.192	300.000.000	Kab. Bombana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2.931	400.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2508	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1.300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	400.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	500.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	500.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	500.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kasus	1	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kasus	1	200.000.000	Kab. Bombana
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1.300.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	2.192.000.000	Kab. Bombana

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	1	300.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	1	300.000.000	Kab. Bombana
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	300.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	300.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	500.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	500.000.000	Kab. Bombana
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan		1	110.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan		1	110.000.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	110.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	110.000.000	Dinkes
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes Sesuai Standar		100%	1.310.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes Sesuai Standar		100%	1.310.000.000	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin Praktik			110.000.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin Praktik			110.000.000	

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	110.000.000	Dinkes
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan di Faskes sesuai standar			500.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan di Faskes sesuai standar			500.000.000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	220	500.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	220	500.000.000	Rarowatu Utara
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	200	700.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	150	700.000.000	Dinkes

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan/Kelurahan/Desa yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)		75%	220.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan/Kelurahan/Desa yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)		75%	220.000.000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan, organisasi masyarakat dalam upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat		22	220.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan, organisasi masyarakat dalam upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat		22	220.000.000	Dinkes dan 22 PKM
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	220.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	220.000.000	Dinkes dan 22 PKM
Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas (%)	Persen	100	17.560.000.000	Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas (%)	Persen	100	27.855.000.000	Kab. Bombana
	Cakupan pemenuhan ketersediaan obat (%)	Persen	100			Cakupan pemenuhan ketersediaan obat (%)	Persen	100		
	Persentase Pelayanan kesehatan di rumah sakit(%)	Persen	100			Persentase Pelayanan kesehatan di rumah sakit(%)	Persen	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Persen	100	16.795.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Persen	100	27.090.000.000	
	Persentase Masyarakat yang Mendapat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (%)	Persen	100			Persentase Masyarakat yang Mendapat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (%)	Persen	100		

DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan BOR di Rumah Sakit Rujukan (%)	Persen	73.00		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan BOR di Rumah Sakit Rujukan (%)	Persen	73.00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)	Persen	75	7.255.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)	Persen	75	17.550.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	400.000.000	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	400.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	600.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	600.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	4	400.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	4	400.000.000	Kab. Bombana

Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	paket	60	500.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	paket	60	500.000.000	Kab. Bombana
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	8	700.000.000	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	8	700.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	5	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	5	200.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	22	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	22	100.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	5	300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	300.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	5	250.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	5	250.000.000	Kab. Bombana

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	4	400.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	4	400.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	80	5.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	80	10.300.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Unit	97%	1.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Unit	97%	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Unit	98%	1.000.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Unit	98%	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	23	300.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	23	300.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		100%	8.850.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		100%	8.850.000.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	7.700.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	7.700.000.000	Kab. Bombana

Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	400.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	400.000.000	Kab. Bombana
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	400.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	400.000.000	Kab. Bombana
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	150.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	150.000.000	Kab. Bombana
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	17	200.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	17	200.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang memiliki izin di kabupaten/kota			690.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang memiliki izin di kabupaten/kota			690.000.000	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	1	170.000.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	1	170.000.000	Kab. Bombana
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	5	520.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	5	520.000.000	Kab. Bombana

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Persen	87%	765.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Persen	87%	765.000.000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan			165.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan			165.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	165.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	165.000.000	Kab. Bombana
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diberikan			120.000.000	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diberikan			120.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1	120.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1	120.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diterbitkan			130.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diterbitkan			130.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	130.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	130.000.000	Kab. Bombana

Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase permohonan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) yang diterbitkan			100.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase permohonan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) yang diterbitkan			100.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	100.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase permohonan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan			100.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase permohonan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan			100.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1	100.000.000	Kab. Bombana
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang disusun			150.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang disusun			150.000.000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Sarana	40	150.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Sarana	40	150.000.000	Kab. Bombana
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Sakip				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Sakip				
	Nilai Sakip PD	B	80.00			Nilai Sakip PD	B	73.65		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		100	53.665.860.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		100	57.465.860.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun		3	67.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun		3	67.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	10.000.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	27.000.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	30.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	37.255.360.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	41.055.360.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1	37.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1	40.800.000.000	Kab. Bombana
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	210.360.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	210.360.000	Kab. Bombana

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	25.000.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	20.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah		100	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah		100	150.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	150.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	150.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	115.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	115.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2	70.000.000	Kab. Bombana
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3	45.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3	45.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100	959.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100	959.000.000	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	215.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	215.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	200.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	24.000.000	Kab. Bombana
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	20.000.000	Kab. Bombana
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	300.000.000	Kab. Bombana
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	200.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	200.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		7	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		7	250.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	50.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	Kab. Bombana

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	50.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	1.321.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	1.321.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	6.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2	315.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2	315.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi		25	700.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi		25	700.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24	150.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24	350.000.000	Kab. Bombana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	200.000.000	Kab. Bombana
Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD		100	12.848.500.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD		100	12.848.500.000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		1	12.848.500.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		1	12.848.500.000	Kab. Bombana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 adalah "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*" dengan prioritas pembangunan adalah :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan program prioritas adalah :
 - Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan ;
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - Peningkatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sector riil dan industri;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan program priortas:
 - Pembangunan wilayah Pulau Sumatra;
 - Pengembangan wilyah Pulau jawa-Bali
 - Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan wilayah Maluku; dan
 - Pengembangan wilayah Papua.
- c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas :
 - Perlindungan social dan penguatan tata Kelola kependudukan;
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan social;

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
 - Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan yang berkualitas;
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - Pengantasan kemiskinan;
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas:
- Revolusi mental dan pembinaan idiologi Pancasila;
 - Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - Memperkuat moderasi beragama;
 - Meningkatkan budaya litaresi, inovasi dan kreativitas.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan program prioritas:
- Infrastruktur pelayanan dasar;
 - Infrastruktur Ekonomi;
 - Infrastruktur perkotaan;
 - Energi dan ketenagalistrikan;
 - Transformasi digital
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan program prioritas:
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - Pembangunan rendah karbon.
- g. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan public, dengan prioritas :
- Konsolidasi demokrasi;
 - Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - Penegakan hukum nasional;
 - Reformasi birokrasi dan tatakelola;
 - Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang hendak dicapai pada periode 2018-2023 adalah “Mewujudkan Sulawesi Tenggara Yang

Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Agar Dapat Berdaulat dan Aman dalam Bidang Ekonomi, Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Politik, serta Iman dan Taqwa; dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, sejahtera dan bermartabat adalah dengan memberikan jaminan dan kepastian terhadap kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, politik serta iman dan taqwa.
- b. Meningkatkan Daya Saing Wilayah melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Investasi; dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan secara merata berdasarkan kapasitas yang dimiliki dengan memperhatikan sumberdaya alam dan skala usaha yang dapat dikembangkan.
- c. Mendorong Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang Moderen, Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Village Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV-45 Kabupaten Bombana 2017-2022 Governance) serta Memberikan Bantuan kepada Kecamatan dan Kelurahan Sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan; dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur dan birokrasi yang transparan, akuntabel, visioner melalui penerapan teknologi informatika; mendorong peri kehidupan pedesaan yang harmonis berkenaan dengan semakin mandirinya desa dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan (dana desa), serta memperkuat wilayah kecamatan dan kelurahan (khususnya ibukota kecamatan) sebagai pusat-pusat pelayanan pemerintahan dan sosial ekonomi.
- d. Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur dan Aspek-Aspek Sosial Ekonomi; dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan prima dengan melibatkan pilar pemerintah, swasta dan masyarakat madani melalui penyediaan infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah jazirah dan kepulauan.

Pembangunan kesehatan pada prinsipnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dapat di selaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bombana diselenggarakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Bombana yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” .

Dengan memperhatikan sasaran tersebut, sangat jelas bahwa pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Perhatian ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku dan pemerhati kesehatan untuk melakukan lompatan besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bombana. Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan dengan visi “Menuju Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dengan menganut dan munjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut : (a) Pro Rakyat, (b) Inklusi, (c) Responsif, (d) Efektif, dan (f) Bersih.

Sehingga sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan sumber daya manusia dari sektor kesehatan adalah peningkatan angka harapan hidup, melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola antara lain melalui peningkatan kualitas dan cakupan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayananan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bombana, termasuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Sehingga dapat tercapainya tujuan utama dari Pelayanan Kesehatan adalah peningkatan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Berdasarkan Visi “Dinas Kesehatan yang Profesional Untuk Mewujudkan Masyarakat Bombana Sehat, Mandiri dan sejahtera” serta untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menetapkan Misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan;
2. Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan;
3. Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

Dalam Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang sesuai dengan Misi yaitu::

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin;
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan Remaja;
3. Meningkatnya status gizi pada masyarakat terutama balita;
4. Meningkatnya pelayanan Kesehatan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular;
5. Meningkatnya mutu akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah;
8. Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yaitu sebagai berikut

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui penyediaan jaminan kesehatan masyarakat yang berprinsip keadilan sehingga seluruh masyarakat Bombana dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan remaja;
3. Meningkatkan cakupan pelayanan gizi dan pelaksanaan intervensi stunting;
4. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana dan perkembangan ilmu kesehatan
5. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan puskesmas/pustu sesuai standar untuk keselamatan pasien

6. Meningkatkan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dapat menjawab kompleksitas permasalahan kesehatan
7. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui tata kelola administrasi dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan publik termasuk upaya-upaya registrasi dan akreditasi sarana, prasarana kesehatan, peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan
8. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesehatan dan penerapan pola hidup sehat guna terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari tatanan individu, keluarga, masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan serta pengawasan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bombana dalam mendukung proses pembangunan kesehatan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyusun beberapa program dan kegiatan untuk tahun 2024 untuk mendukung program pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan, yaitu:

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

No	Urusan/ OPD/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA BIDANG KESEHATAN	
DINAS KESEHATAN	
I.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
-	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
-	Pembangunan Puskesmas
-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
-	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
-	Pengembangan Rumah Sakit
-	Pengembangan Puskesmas
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
-	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
-	Pengadaan Obat, Vaksin
-	Pengadaan Bahan Habis Pakai
-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
-	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
-	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
-	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
-	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
-	Operasional Pelayanan Puskesmas
-	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
II.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
-	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
6.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
7.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
III.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
8.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
9.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
11.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
12.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
13.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
-	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
14.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

17.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
19.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-	Pengadaan Mebel
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23.	Peningkatan Pelayanan BLUD
-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Lokasi
		Satuan	Target	Rp	
(4)	(5)		(10)	(11)	(19)
	Angka Umur Harapan Hidup (UHH)	Indeks	71.18	44.887.000.000	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Indeks	0.0	17.032.000.000	Kab. Bombana
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Indeks	0.0		
	Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Persen	100		
	Prevalensi Balita Stunting	Indeks	19,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%)	Persen	100	15.502.000.000	Kab. Bombana
	Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	Persen	100		
	Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Persen	100		
	Persentase Pelayanan Balita Stunting (%)	Persen	100		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persen	100%	15.392.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.205	2.000.000.000	Kab. Bombana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4.014	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3.823	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7635	500.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5819	400.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	120.218	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.192	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2.931	400.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2508	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	2.000.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	300.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	400.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	500.000.000	Kab. Bombana
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	500.000.000	Kab. Bombana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kasus	1	200.000.000	Kab. Bombana
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	2.192.000.000	Kab. Bombana
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	1	300.000.000	Kab. Bombana
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	300.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	500.000.000	Kab. Bombana
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan		1	110.000.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	110.000.000	Dinkes
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes Sesuai Standar		100%	1.310.000.000	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin Praktik			110.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	110.000.000	Dinkes
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan di Faskes sesuai standar			500.000.000	

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	220	500.000.000	Rarowatu Utara
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	150	700.000.000	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan/Kelurahan/Desa yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)		75%	220.000.000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan, organisasi masyarakat dalam upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	Kec	22	220.000.000	Dinkes dan 22 PKM
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	220.000.000	Dinkes dan 22 PKM
	Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas (%)	Persen	100	27.855.000.000	Kab. Bombana
	Cakupan pemenuhan ketersediaan obat (%)	Persen	100		
	Persentase Pelayanan kesehatan di rumah sakit(%)	Persen	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	Persen	100	27.090.000.000	
	Persentase Masyarakat yang Mendapat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (%)	Persen	100		

	Persentase ketersediaan BOR di Rumah Sakit Rujukan (%)	Persen	50		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)	Persen	75	17.550.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	400.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	4	600.000.000	Kab. Bombana
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	4	400.000.000	Kab. Bombana
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	paket	60	500.000.000	Kab. Bombana
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	8	700.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	5	200.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	22	100.000.000	Kab. Bombana

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	300.000.000	Kab. Bombana
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	5	250.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	4	400.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	80	10.300.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Unit	97%	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Unit	98%	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	23	300.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		100%	8.850.000.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	7.700.000.000	Kab. Bombana
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	400.000.000	Kab. Bombana
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	400.000.000	Kab. Bombana

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	150.000.000	Kab. Bombana
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	17	200.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang memiliki izin di kabupaten/kota			690.000.000	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	1	170.000.000	Kab. Bombana
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	5	520.000.000	Kab. Bombana
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Persen	87%	765.000.000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan			165.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	165.000.000	Kab. Bombana

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diberikan			120.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1	120.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diterbitkan			130.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	130.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase permohonan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) yang diterbitkan			100.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	100.000.000	Kab. Bombana
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase permohonan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan			100.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1	100.000.000	Kab. Bombana
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang disusun			150.000.000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Sarana	40	150.000.000	Kab. Bombana
	Nilai Sakip				
	Nilai Sakip PD	Indeks	73.65		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persen	100	57.465.860.000	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Dokumen	3	67.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	27.000.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	30.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	41.055.360.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	40.800.000.000	Kab. Bombana
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	210.360.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	25.000.000	Kab. Bombana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	1	20.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Persen	100	150.000.000	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	150.000.000	Kab. Bombana
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	115.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Paket	2	70.000.000	Kab. Bombana
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	Kab. Bombana
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	959.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	1	215.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	1	200.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tahun	1	24.000.000	Kab. Bombana
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tahun	1	20.000.000	Kab. Bombana
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	300.000.000	Kab. Bombana
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tahun	1	200.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	5	250.000.000	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	Kab. Bombana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1.321.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	6.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun	1	315.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahun	1	1.000.000.000	Kab. Bombana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Persen	100	700.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	150.000.000	Kab. Bombana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	350.000.000	Kab. Bombana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	Kab. Bombana
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD		100	12.848.500.000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Tahun	1	12.848.500.000	Kab. Bombana

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2024

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024 dan prioritas pembangunan kabupaten Bombana Tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2024 sehingga dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana melakukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Dinas Kesehatan kabupaten Bombana menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja /kegiatan (output) dan target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dapat di lihat pada table 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(18)	(19)
		X XX						
Meningkatkan Kualitas SDM				Angka Umur Harapan Hidup (UHH)	71.18	44.887.000.000		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Ibu (AKI)	0.0	17.032.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
				Angka Kematian Bayi (AKB)	0.0			
				Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100			
				Prevalensi Balita Stunting	19,00			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%)	100	15.502.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
				Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	100			
				Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular dan Tidak menular	100			
				Persentase Pelayanan Balita Stunting (%)	100			
			1 2 2 202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%	15.392.000.000	

1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.205	2.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.014	2.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.823	2.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7635	500.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5819	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120.218	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.192	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	02	02	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.931	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	02	02	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2508	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	2.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana

1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	500.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	500.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1	200.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	02	02	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	2.192.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	500.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan	1	110.000.000		
1	2	2	203	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	110.000.000	Dinas Kesehatan	Dinkes
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes Sesuai Standar	100%	1.310.000.000		

1	2	3	2	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin Praktik		110.000.000		
1	2	3	201	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	110.000.000	Dinas Kesehatan	Dinkes
1	2	3	2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan di Faskes sesuai standar		500.000.000		
1	2	3	202	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	220	500.000.000	BLUD RSU	Rarowatu Utara
1	2	3	2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		700.000.000		
1	2	3	2	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150	700.000.000	Dinas Kesehatan	Dinkes
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan/Kelurahan/Desa yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)	75%	220.000.000		
1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan, organisasi masyarakat dalam upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	22	220.000.000	Dinkes	Dinkes dan 22 PKM

	1	02	05	201	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	220.000.000	Dinas Kesehatan	Dinkes dan 22 PKM	
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan							Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas (%)	100	27.855.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana	
							Cakupan pemenuhan ketersediaan obat (%)	100				
							Persentase Pelayanan kesehatan di rumah sakit(%)	100				
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	100	27.090.000.000			
							Persentase Masyarakat yang Mendapat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (%)	100				
							Persentase ketersediaan BOR di Rumas Sakit Rujukan (%)	100				
		1	2	2	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)	75	17.550.000.000		Kab. Bombana
		1	2	2	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1.000.000.000	BLUD RSU	Kab. Bombana
		1	2	2	201	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
	1	2	2	201	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	600.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana	
	1	2	2	201	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana	

1	2	2	201	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	60	500.000.000	BLUD RSU	Kab. Bombana
1	2	2	201	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8	700.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5	200.000.000	BLUD RSU	Kab. Bombana
1	2	2	201	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	22	100.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5	250.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	100.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80	10.300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	02	02	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	97%	1.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana

1	02	02	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	98%	1.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	23	300.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%	8.850.000.000		
1	02	02	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	7.700.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	400.000.000	BLUD RSU	Kab. Bombana
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	400.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	150.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	2	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	200.000.000	BLUD RSU	Kab. Bombana
1	2	2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang memiliki izin di kabupaten/kota		690.000.000		
1	2	2	204	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1	170.000.000	BLUD RSU	Kab. Bombana

1	02	02	204	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5	520.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	87%	765.000.000		
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan		165.000.000		
1	2	4	201	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	165.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
1	2	4	201	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	-	-	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diberikan		120.000.000		

1	2	4	202	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	120.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang diterbitkan		130.000.000		
1	2	4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	130.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase permohonan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) yang diterbitkan		100.000.000		

		1	2	4	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	100.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
							Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase permohonan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan		100.000.000		
		1	2	4	205	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	100.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang disusun		150.000.000		
		1	2	4	206	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	150.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Bombana
'Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang								Nilai Sakip				
								Nilai Sakip PD				

bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	100	57.465.860.000			
		X	XX	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	3	67.000.000		
		X	XX	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	27.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	30.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	41.055.360.000		
		X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	40.800.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	210.360.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	25.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana

X	XX	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	20.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
X	XX	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100	150.000.000		
X	XX	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	150.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	115.000.000		
X	XX	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	70.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
X	XX	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	45.000.000	RSUD	Kab. Bombana
X	XX	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	959.000.000		
X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	215.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	200.000.000	Dinkes	Kab. Bombana

X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	24.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
X	XX	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	20.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	300.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	200.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	7	250.000.000		
X	XX	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	50.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	50.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
X	XX	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	50.000.000	Dinkes	Kab. Bombana

		X	XX	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.321.000.000		
		X	XX	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	6.000.000	RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	315.000.000	Dinkes & RSUD	Kab. Bombana
		X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.000.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
		X	XX	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	25	700.000.000		
		X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	150.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
		X	XX	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	350.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
		X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	Dinkes	Kab. Bombana
		X	XX	1	210		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan peningkatan pelayanan BLUD	100	12.848.500.000		
		X	XX	1	210	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	1	12.848.500.000	RSUD	Kab. Bombana

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada sasaran dan program prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indicator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2024. Dengan adanya Renja Tahun 2024 di harapkan dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih baik dan tepat sasaran. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan kesehatan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Keberhasilan dari pencapaian target kinerja Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2024 tidak lepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Untuk itu, Renja Dinas Kesehatan kabupaten Bombana tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Program/Kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2024, maka akan dilakukan penyesuaian pada perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang

dilaksanakan di Dinas Kesehatan, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Sekretariat, Bidang-Bidang, Seksi-Seksi dan seluruh Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya terutama dalam hal pencapaian target indicator yang telah ditetapkan.
- b) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan kesehatan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPd Provinsi, RPJPD Kabupaten Bombana, RPJMD Kabupaten Bombana, RKPd Kabupaten Bombana dan Renstra SKPD).
- c) Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- b) Dalam rangka sinergitas pembangunan kesehatan, koordinasi dengan lintas sector dan lintas program harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

- c) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d) Dalam menetapkan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2024, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang